

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Afriani, M. E. (2016). Kuasa Menjual Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pecan Baru. *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*.
- Algra, N. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Amir, M. (2010). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh PPAT*. Jakarta: Media Ilmu.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. (2005). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fea, D. R. (2018). *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*. Yogyakarta.: Legality.
- Fuady, M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada,.
- H.S., S. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (2014). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukuan dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (1995). *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXV. Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

- HR, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Husni, M. (2009). *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: UMPAM Press.
- Indonesia, K. B. (1995). *Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang: Ghalia Indonesia.
- Kohar, A. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (2006 ). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak. Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Muhamad, A. k. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- S., S. H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S., S. H. (2008). *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak,*. Jakarta : Sinar Grafika.
- S., S. H. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S., S. H. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- S., S. H., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salindeho, J. (1993). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-4*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti,.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sujamto. (1987). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, E. K. (2020). Kedudukan Notaris dan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Jaminan Perlindungan Bagi Para Pihak. *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 2*.
- Sutedi, A. (2008). *Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taslim, J. (2011). *PPAT Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Suatu Analisis Yuridis Normatif)*. Bandung: Tarsito.
- Tobing, G. L. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan II*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi**

- Andi Mamminanga, 2008, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Aulia Farazenia. “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang Hasil Pembayaran Dikembalikan Kepada Pihak Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019)*”. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2019.
- Farazenia, Aulia, (2019). ” *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang Hasil Pembayaran Dikembalikan Kepada Pihak Pembeli (Studi Kasus Putusan*

*Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019*”. Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Franco Sentanu. 2019 “*Analisis Yuridis Pengajuan Gugatan Pembatalan Pengikatan Jual Beli (Pjb) Hak Atas Tanah Oleh Pihak Calon Penjual Karena Adanya Gugatan Dari Pihak Ketiga (Studi Putusan MA NO. 3703.K/PDT/2016)*”. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Putri, M.K., Anwary, I., Haiti, D. 2022. Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Jurnal Nolaj*. 1(2)

Sentanu, Franco. 2019. “*Analisis Yuridis Pengajuan Gugatan Pembatalan Pengikatan Jual Beli (Pjb) Hak Atas Tanah Oleh Pihak Calon Penjual Karena Adanya Gugatan Dari Pihak Ketiga (Studi Putusan MA NO. 3703.K/PDT/2016)*”. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Susanti. 2018. *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan DiKota Batam*. Universitas Internasional Batam.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tata Cara, Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Nomor M.02.

PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16  
Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara  
Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas  
Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, NOMOR:  
M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 mengatur tentang tata cara pelak sanaan tugas  
Majelis Pengawas Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tantang Peraturan Jabatan Pembuat  
Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur Nomor  
03/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/IX/2018

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara